

REVITALISASI ORGANISASI PENEGAK DISIPLIN SEKOLAH DI SMAN 1 KOTO XI TARUSAN

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sosiologi FIS UNP*



OLEH:

VANI MUTIA DEWI
1101795/2011

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Revitalisasi Organisasi Penegak Disiplin Sekolah di SMAN 1 Koto XI Tarusan

Nama : Vani Mutia Dewi
Bp/ Nim : 2011/ 1101795
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2016

Pembimbing I


Nora Sudiawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19730809 199803 2 001

Pembimbing II


Ike Sylvia, S.IP., M.Si
NIP.19770608 200501 2 002

Diketahui Oleh,
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Rabu, 03 Agustus 2016**

**Revitalisasi Organisasi Penegak Disiplin Sekolah
di SMAN 1 Kotu XI Tarusan**

Nama : Vani Mutia Dewi
Bp/ Nimi : 2011/ 1101795
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2016

TIM PENGUJI NAMA

TANDA TANGAN

1. Ketua : Nora Susilawati, S.Sos., M.Si
2. Sekretaris : Ike Sylvia, S.IP., M.Si
3. Anggota : Jamaidi, S.Pd., M.Si
4. Anggota : Delmira Syafrini, S.Sos., M.A
5. Anggota : Eka Asih Febriani, S.Pd., M.Pd



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vani Mutia Dewi
BP/NIM : 2011/1101795
Prodi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi saya yang berjudul Revitalisasi Organisasi Penegak Disiplin Sekolah di SMAN 1 Koto XI Tarusan adalah benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2016

Diketahui Oleh,

Ketua Jurusan Sosiologi


Nora Susilawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001

Saya yang menyatakan,


Vani Mutia Dewi
2011/1101795

ABSTRAK

Vani Mutia Dewi. 2011/1101795. Revitalisasi Organisasi Penegak Disiplin Sekolah di SMAN 1 Koto XI Tarusan. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2016.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk menjelaskan tidak efektifnya Komite Disiplin Sekolah (KDS) dalam menegakkan peraturan tata tertib SMA N 1 Koto XI Tarusan. Hal tersebut diketahui dari tingginya angka pelanggaran yang dilakukan siswa. Sehingga untuk menegakkan kembali peraturan tata tertib di sekolah, KDS diubah menjadi Gerakan Disiplin Sekolah (GDS). Setelah GDS beroperasi menegakkan kedisiplinan di sekolah, jumlah pelanggaran yang dilakukan siswa mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui faktor tidak efektifnya KDS dalam menegakkan kedisiplinan dan cara GDS dalam menegakkan kedisiplinan di SMA N 1 Koto XI Tarusan.

Permasalahan ini dianalisis dengan teori kontrol sosial oleh Peter L. Berger yang mengatakan bahwa kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan untuk menertibkan anggota yang membangkang dengan cara *persuasive* dan *coercive*. Selain itu, permasalahan ini dianalisis dengan teori kontrol sosial oleh T. Harschi yang mengemukakan bahwa penyimpangan adalah hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Meningkatnya pelanggaran yang dilakukan siswa di sekolah merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial oleh KDS yang juga disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk menegakkan kembali kedisiplinan di sekolah GDS melakukan berbagai mekanisme yaitu *persuasive* dan *coercive*.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus kolektif. Melalui teknik *purposive sampling* diperoleh informan sebanyak 32 orang yang terdiri atas kepala sekolah, 16 orang anggota KDS sekaligus GDS, 5 orang guru mata pelajaran, 2 orang guru BK, 4 orang siswa, 2 orang pemilik warung dan 2 orang tua/ wali murid. Dalam pengumpulan data, wawancara yang dilakukan dengan tipe wawancara mendalam dan berstruktur. Teknik observasi dilakukan dengan tipe observasi partisipasi pasif serta studi dokumentasi terhadap data tertulis yang ingin peneliti temukan. Data dianalisis dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman..

Hasil penelitian menunjukkan faktor- faktor penyebab tidak efektifnya KDS terdiri dari (1) kerja sama tim tidak menggerakkan anggota KDS dalam menjalankan tugasnya (2) kurangnya tenaga kerja (3) kurangnya kontrol kinerja KDS oleh Kepala Sekolah (4) ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan tunjangan, (5) jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah sangat jauh (6) lingkungan sekolah yang tidak mendukung. Sedangkan, cara-cara GDS dalam menegakkan disiplin adalah (1) mengganti sistem kerja tim dengan gerakan perseorangan (2) memperketat dan mempertegas pelaksanaan sanksi dan pelanggaran (3) mensinkronkan kerja antara kepala sekolah, BK, dan GDS (4) mensosialisasikan tata tertib sekolah kepada pihak-pihak yang terkait (siswa, guru, lingkungan sekitar atau tokoh masyarakat).

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Revitalisasi Organisasi Penegak Disiplin Sekolah di SMAN 1 Koto XI Tarusan”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata 1 pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Ike Sylvia, S.IP., M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran serta ikhlas dan penuh kesabaran membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang terdiri dari Bapak Junaidi, S.Pd., M.Si, Ibu Delmira Syafrini, S.Sos., M.A, dan Ibu Eka Asih Febriani, S.Pd., M.Pd yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nora Susilawati, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Sosiologi dan Bapak serta Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari keluarga khususnya orang tua, untuk itu pada kesempatan kali ini dengan sangat istimewa dan

dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terakhir buat rekan-rekan Jurusan Sosiologi, khususnya angkatan 2011 yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segala pihak sangat diharapkan. Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasandan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis	11
F. Penjelasan Konsep	17
1. Revitalisasi	17
2. Organisasi	18
3. Komite Disiplin Sekolah.....	18
4. Gerakan Disiplin Sekolah	19
G. Metodologi Penelitian	20
1. Lokasi Penelitian.....	20
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian	20
3. Informan Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Triangulasi Data.....	27
6. Teknik Analisis Data.....	28

BAB II KOMITE DISIPLIN SEKOLAH (KDS) DAN GERAKAN DISIPLIN SEKOLAH (GDS) SMA NEGERI 1 KOTO XI TARUSAN

A. SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan	31
1. Sejarah Ringkas Sekolah.....	31
2. Visi dan Misi Sekolah	31
3. Keadaan Sekolah.....	32
a. Keadaan Fisik Sekolah.....	32
b. Keadaan Lingkungan Sekolah	32
c. Keadaan Guru dan Siswa	33
4. Fasilitas Sekolah.	45
5. Tata Tertib sekolah	36
a. Sebelum dan Sesudah Belajar	36
b. Kegiatan Upacara Bendera	38
c. Pakaian	38
6. Proses Belajar Mengajar.	39
B. GERAKAN DISIPLIN SEKOLAH (GDS)	40
1. Sejarah Berdirinya GDS	40
2. Struktur GDS.....	40
3. Tugas-tugas GDS	41

BAB III REVITALISASI KOMITE DISIPLIN SEKOLAH (KDS) MENJADI GERAKAN DISIPLIN SEKOLAH (GDS)

A. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Komite Disiplin Sekolah ...	44
1. Kerja Sama Tim Tidak Menggerakkan Anggota KDS Dalam Menjalankan Tugas.....	44
2. Kurangnya Tenaga Kerja	57
3. Kurangnya Kontrol Kinerja KDS oleh Kepala Sekolah	64
4. Ketidakseimbangan Antara Pekerjaan Dengan Tunjangan.....	69
5. Jarak Tempat Tinggal Siswa Dengan Sekolah Sangat Jauh	74
6. Lingkungan Sekolah Yang Tidak Mendukung	81

B. Cara-cara Gerakan Disiplin Menegakkan Disiplin.....	89
1. Mengganti Sistem Kerja Tim Dengan Gerakan Perseorangan	89
2. Memperketat Dan Mempertegas Pelaksanaan Sanksi Dan Pelanggaran	94
3. Mensingkronkan Kerja Antara Kepala Sekolah, Guru, BK, dan Gerakan Disiplin Sekolah.....	101
4. Mensosialisasikan Tata Tertib Sekolah dan Membangun Kerja Sama dengan Orang Tua serta Pihak Lingkungan Sekolah.....	108

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pelanggaran peraturan tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan Januari- Juni 2009.....	3
2. Rekapiltulasi Pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan dari Tahun 2009-2015	6
3. Pelanggaran Peraturan Tata Tertib Sekolah yang dilakukan oleh Siswa SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan Januari-Juni 2016	8
4. Data Guru Mata Pelajaran SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan	33
5. Jumlah Tenaga Pendukung SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan	34
6. Jumlah Siswa SMA N 1 Koto XI Tarusan Tahun Ajaran 2015/2016.....	35
7. Data Ruangan Milik SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Jumlah Pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan dari Tahun 2009-2015	5
2. Skema model analisis data interaktif dari Milles dan Huberman.	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Surat Tugas Pembimbing
4. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
5. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan
6. Surat Izin Penelitian dari SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan
7. Peraturan Tata Tertib Siswa Beserta Sanksi
8. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kondisi masyarakat Indonesia sudah sangat memprihatinkan, khususnya para pemuda-pemudi yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Keprihatinan yang sangat mendalam itu adalah semakin meluasnya penyimpangan moral yang melahirkan berbagai macam perbuatan buruk yang dilakukan oleh hampir setiap orang. Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka akan semakin merusak moral anak bangsa. Untuk itu keadaan tersebut harus segera diakhiri dengan berbagai cara dan usaha yang harus dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat, termasuk juga lembaga pendidikan, khususnya sekolah. Banyaknya perilaku negatif di sekolah menunjukkan pentingnya disiplin sekolah.¹

Disiplin adalah suatu keadaan tertib, ketika orang-orang yang bergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati.² Disiplin merupakan bentuk perilaku patuh dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku tetapi kepatuhan itu lebih ditekankan pada kesadaran diri bukan karena paksaan. Demi terlaksana atau terciptanya kondisi yang disiplin, maka sekolah membentuk peraturan tata tertib sekolah yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan.³

¹Mulyasa, E. 2009.*Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (kemandirian guru dan kepala sekolah)*.Jakarta: Bumi Aksara, hlm 192

²*Ibid.*,. Hlm 191

³Abu, Rifai & dkk. 1989. *Disiplin Murid SMTA di Lingkungan Pendidikan Formal*. Jakarta: Depdikbud. Hlm 37

Peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. Tata tertib sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan disiplin dan tata tertib sekolah adalah terlaksananya kurikulum secara baik yang menunjang mutu pendidikan di sekolah, sedangkan secara khusus tujuan dari tata tertib sekolah adalah agar siswa mempunyai kepribadian yang tangguh, disiplin dan mandiri serta memiliki rasa hormat kepada kepala sekolah, guru dan orang tua.

Kedisiplinan dan ketertiban di sekolah sangat penting, hal ini juga berlaku di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan. Setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib sekolah. Peraturan, tata tertib dan berbagai ketentuan lainnya berupaya untuk mengatur perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan tata tertib yang ada di sekolah.

Peraturan tata tertib sekolah yang telah dibentuk diharapkan dapat terlaksana dengan baik serta terciptanya kondisi yang disiplin dan tertib. Selain peraturan tata tertib tersebut juga diberlakukan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Bagi siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah akan di tindak lanjut berdasarkan bobot kesalahan. Semakin tinggi tingkat atau bobot poin pelanggaran siswa maka semakin tinggi tindakan atau sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Namun, pada kenyataannya siswa tidak peduli terhadap peraturan tata tertib sekolah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian siswa terhadap aturan yang telah ditetapkan, hukuman yang diberikan tidak diindahkan dan bahkan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 1. Pelanggaran peraturan tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan Januari- Juni 2009

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Kehadiran (terlambat, alfa dan cabut)	1854
2	Kerapian (pakaian, perhiasan, penampilan)	596
3	Perbuatan asusila dan amoral (rokok, miras, judi dan napza)	472
4	Kesopanan	183

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan, 2015

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pelanggaran peraturan tata tertib sekolah dikelompokkan dalam 4 jenis kasus atau pelanggaran. Masalah kehadiran yang meliputi terlambat, alfa dan cabut merupakan jenis kasus yang sangat banyak terjadi di SMA N 1 Koto XI Tarusan dan sangat sulit untuk diatasi. Selain itu kasus mengenai kerapian, perbuatan asusila dan amoral serta kesopanan masih bisa diawasi dan diatasi oleh pihak sekolah. Kasus pelanggaran peraturan tata tertib sekolah umumnya dilakukan oleh siswa yang sama.

Seharusnya penanganan siswa bermasalah melalui pendekatan disiplin yang merujuk pada aturan dan ketentuan tata tertib sekolah beserta sanksinya. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan. Siswa yang melakukan pelanggaran seringkali tidak diproses oleh guru piket maupun guru bimbingan konseling.

Sehingga siswa tidak peduli akan aturan sekolah tersebut dan tetap melakukan pelanggaran berulang kali.

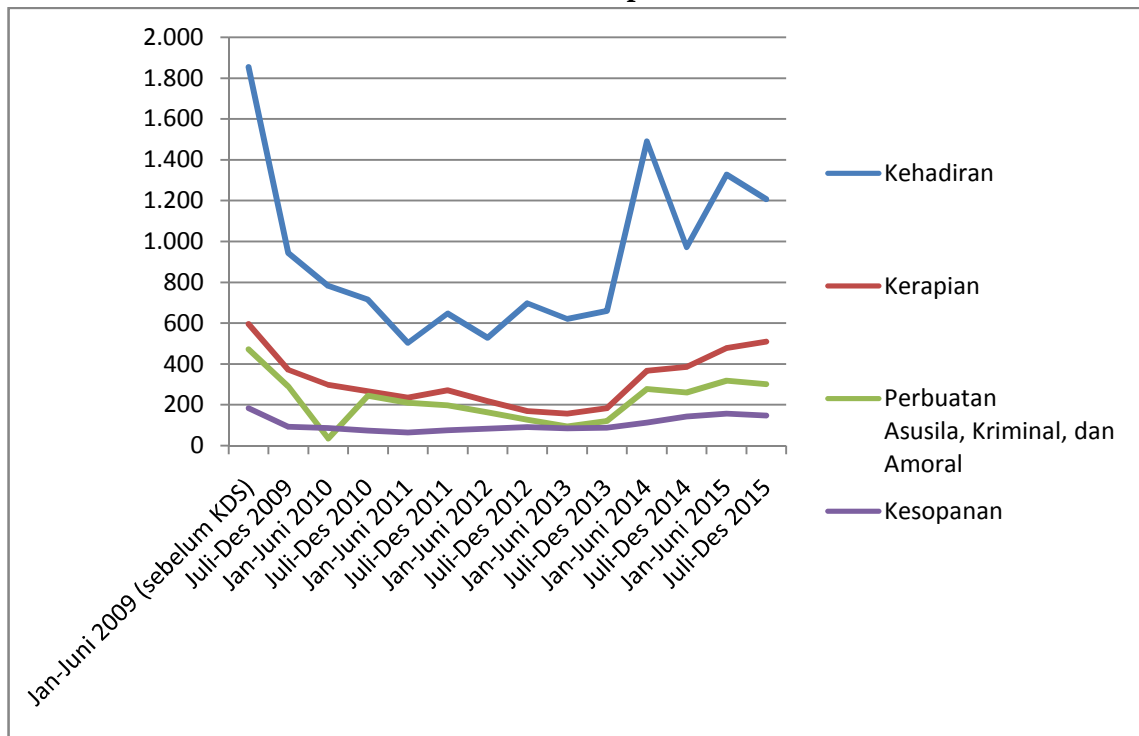
Bertolak dari keadaan siswa yang semakin tidak peduli terhadap peraturan tata tertib sekolah dan sanksi yang telah ditetapkan serta semakin banyaknya terjadi pelanggaran, maka pihak sekolah berupaya untuk menangani dan menanggulangi hal tersebut. Pihak sekolah, komite sekolah, wali murid serta tokoh masyarakat melakukan musyawarah. Dari musyawarah yang telah dilakukan tersebut semua pihak sepakat untuk membentuk Komite Disiplin Sekolah (KDS) sebagai lembaga sekolah yang bertujuan untuk mengontrol perilaku siswa agar tetap berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Komite Disiplin Sekolah (KDS) diresmikan pada Juli 2009. Komite Disiplin Sekolah ini diketuai oleh Drs. Armen dan anggota yang terdiri dari guru-guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan. Tugas dari KDS ini adalah melaksanakan peraturan dan tata tertib sekolah beserta sanksi yang telah ditetapkan oleh sekolah.⁴

Sebelum adanya komite disiplin sekolah, kondisi siswa di SMAN 1 Koto XI Tarusan sangat tidak beraturan. Peraturan tata tertib sekolah tidak dijalankan dengan semestinya. Kemudian pada masa awal dibentuknya KDS peraturan tata tertib sekolah sudah dilaksanakan kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran tanpa terkecuali. Karena dengan adanya peraturan tata tertib sekolah dan sanksi yang telah dilaksanakan siswa mulai berfikir dan takut untuk melakukan pelanggaran, sehingga tidak ada lagi siswa yang menyimpang dari aturan yang telah diberlakukan. Namun beberapa periode setelah dibentuknya KDS yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2015,

⁴ Data diperoleh dari arsip tata usaha SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan

pelaksanaan peraturan tata tertib sekolah mulai terabaikan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini:

Grafik 1. Jumlah Pelanggaran Peraturan Tata Tertib Sekolah Siswa SMAN 1 Koto XI Tarusan pada Tahun 2009-2015



Sumber: Wakil Kesiswaan SMA N 1 Koto XI Tarusan, 2016

Tabel 3. Rekapitulasi Pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan dari Tahun 2009-2015

No	Jenis Pelanggaran	Sebelum KDS Terbentuk (Januari-Juni 2009)	Masa Tugas KDS (Pertengahan Tahun 2009-2015)												
			Juli-Des 2009	Jan-Juni 2010	Juli-Des 2010	Jan-Juni 2011	Juli-Des 2011	Jan-Juni 2012	Juli-Des 2012	Jan-Juni 2013	Juli-Des 2013	Jan-Juni 2014	Juli-Des 2014	Jan-Juni 2015	Juli-Des 2015
1.	Kehadiran	1854	943	782	715	503	647	528	698	621	659	1491	972	1327	1207
2.	Kerapian	596	372	298	267	235	272	218	169	157	184	367	386	479	509
3.	Perbuatan asusila, kriminal dan amoral	472	291	253	245	211	198	163	127	94	121	277	261	318	302
4.	Kesopanan	183	93	86	74	65	76	83	92	85	88	113	143	156	148

Sumber: Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan, 2016

Seperti yang terlihat pada grafik serta tabel di atas, menunjukkan bahwa sebelum dibentuknya KDS pada awal tahun 2009 (Januari-Juni) jumlah pelanggaran yang dilakukan siswa sangat banyak. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut yaitu kehadiran sebanyak 1854 kasus, kerapian sebanyak 596 kasus, perbuatan asusila, kriminal dan amoral sebanyak 472 kasus, dan kesopanan sebanyak 183 kasus. Setelah dibentuknya KDS jumlah pelanggaran peraturan tata tertib yang dilakukan oleh siswa semakin berkurang, yaitu pada pertengahan tahun 2009 (Juli-Desember) sampai tahun 2013 (Juli-Desember). Namun, pada awal tahun 2014

(Januari-Juni) jumlah pelanggaran peraturan tata tertib siswa kembali meningkat, diantaranya kehadiran dari 659 kasus menjadi 1491 kasus, kerapian dari 184 kasus menjadi 367 kasus, perbuatan asusila, kriminal dan amoral dari 121 kasus menjadi 227 kasus, sedangkan kesopanan dari 88 kasus menjadi 113 kasus. Meningkatnya jumlah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa disebabkan karena kurangnya kinerja KDS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak kedisiplinan di sekolah. Siswa yang melakukan pelanggaran seringkali tidak diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Karena kurangnya kinerja KDS tersebut, siswa sudah tidak peduli lagi dengan peraturan yang telah ditegakkan kurang lebih selama 5 tahun.

Tidak efisiennya KDS dalam menegakkan peraturan tata tertib di sekolah mendorong Kepala Sekolah mengganti beberapa anggota serta memperbaharui tugas dan anggota KDS. Oleh sebab itu, KDS berganti nama menjadi GDS (Gerakan Disiplin Sekolah). Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) merupakan kegiatan mengontrol siswa dalam bertingkah laku, bersikap dan berpenampilan sesuai dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Fungsi KDS dan GDS masih sama dengan KDS, tapi perbedaannya adalah KDS hanya mengontrol tingkah laku siswa saja sedangkan GDS mengontrol tingkah laku, sikap dan juga penampilan siswa. Rincian tugas GDS adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan peraturan tata tertib berserta sanksinya
2. Membentuk dua pos piket, yaitu di depan gerbang sekolah dan pintu belakang sekolah yang menjadi tempat untuk akses keluar masuk siswa saat jam pelajaran berlangsung.

3. Melaksanakan razia yang lebih diefektifkan, yang dulunya dilakukan hanya sekali dalam sebulan, sekarang ditingkatkan dua kali dalam sebulan. Razia dilakukan tidak hanya di dalam sekolah melainkan juga dilakukan di lingkungan sekitar sekolah seperti 4 warung yang berada di depan sekolah, di sekeliling pagar sekolah.⁵

Kegiatan (GDS) ini mulai dilaksanakan bulan November 2015. Setelah enam bulan GDS menjalankan fungsinya, terjadi perubahan pada pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa. Hal tersebut diketahui melalui data yang diperoleh dari Wakil Kesiswaan SMA N 1 Koto XI Tarusan. Data tersebut menunjukkan pelanggaran peraturan tata tertib yang dilakukan oleh siswa semakin menurun. Berikut data pelanggaran peraturan tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa setelah GDS berfungsi:

Table 3. Pelanggaran Peraturan Tata Tertib Sekolah yang dilakukan oleh Siswa SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan Januari-Juni 2016

No	Jenis Kasus	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah Kasus
1	Kehadiran	179	138	83	71	68	47	586
2	Kerapian	51	42	37	29	26	16	201
3	Perbuatan asusila, kriminal dan amoral	71	63	49	40	35	20	278
4	Kesopanan	47	28	25	8	17	12	137

Sumber: Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa setelah GDS terbentuk, jumlah pelanggaran terhadap peraturan tata tertib sekolah yang terjadi di SMAN 1 Koto XI Tarusan

⁵ Wawancara dengan wakil kesiswaan SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan yaitu Ibu Em Suryani Tasar, S.Pd pada tanggal 7 Maret 2016

mengalami penurunan. Setelah enam bulan GDS terbentuk kedisiplinan dan peraturan tata tertib sekolah sudah mulai dipatuhi oleh siswa, meskipun GDS masih bertugas selama enam bulan dan terbilang baru.

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tentang *Pembinaan Disiplin Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya* oleh Wessy Rosesti (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Wessy Rostesti ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembinaan disiplin siswa oleh guru SMAN Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian tersebut memfokuskan penelitiannya pembinaan disiplin sekolah oleh guru di SMAN Koto Baru Kabupaten Dharmasraya melalui pemberian motivasi, keteladanan, pengawasan dan pemberian sanksi/hukuman. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan mengkaji penegakan disiplin sekolah oleh Gerakan Disiplin Sekolah di SMAN 1 Koto XI Tarusan.

Berdasarkan data dan studi relevan dengan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Revitalisasi Organisasi Penegak Disiplin Sekolah di SMAN 1 Koto XI Tarusan. Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini karena SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan merupakan satu-satunya sekolah yang memiliki organisasi sekolah yang khusus menangani permasalahan kedisiplinan siswa yang awalnya diberi nama Komite Disiplin Sekolah (KDS) dan sekarang untuk menghidupkan kembali fungsi dan tugas KDS tersebut maka diganti menjadi Gerakan Disiplin Sekolah (GDS).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Komite Disiplin Sekolah dibentuk untuk menegakkan kedisiplinan siswa yang bermasalah dalam hal menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Setelah adanya Komite Disiplin Sekolah ini, sudah mulai terjadi perubahan kondisi disiplin di sekolah. Saat upacara bendera, siswa tidak ada lagi yang duduk di depan warung yang berada di depan sekolah, barisan siswa sudah mulai rapi dan kondisi upacara bendera sudah tertib dari yang biasanya. Begitu juga dengan peraturan tata tertib lainnya, sudah mulai dijalankan dengan semestinya atau sesuai dengan yang diharapkan. Namun, kondisi yang sudah mulai stabil ini tidak bertahan lama. KDS mulai mengalami masalah dalam upaya penegakkan kedisiplinan terhadap siswa. Keadaan sekolah mulai kembali seperti sebelum adanya KDS, dikarenakan anggota KDS yang sudah tidak efektif lagi menjalankan tugasnya. Akhirnya KDS diganti menjadi GDS untuk mengefektifkan kembali fungsi dan tugas KDS dalam menegakkan peraturan dan tata tertib sekolah.

Berdasarkan uraian di atas dan latar belakang, peneliti memfokuskan penelitian ini pada penegakkan kedisiplinan oleh Komite Disiplin Sekolah (KDS) dan Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) di SMAN 1 Koto XI Tarusan. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Komite Disiplin Sekolah tidak efektif dalam menegakkan kedisiplinan berdasarkan peraturan tata tertib di SMAN 1 Koto XI Tarusan?
2. Bagaimana cara Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) dalam menegakkan kedisiplinan di SMAN 1 Koto XI Tarusan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor KDS tidak efektif melaksanakan tugasnya dalam menegakkan kedisiplinan dan cara Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) dalam menegakkan kedisiplinan di SMAN 1 Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan bermanfaat:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang kedisiplinan.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang salah satu budaya organisasi sekolah yaitu KDS dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori kontrol sosial (*social control*) yang dikemukakan oleh Peter L. Berger. Berger mengatakan bahwa kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang.⁶ Artinya suatu proses baik yang terencana ataupun tidak terencana, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah atau nilai dan norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pengendalian bertujuan untuk mencapai keserasian antara

⁶Bagong Suyanto dan J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group, hlm 132

stabilitas dengan perubahan masyarakat atau secara ideal bertujuan untuk mencapai kedamaian.⁷

Mekanisme yang dapat ditempuh dalam proses kontrol sosial bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) *Persuasif* yaitu tanpa paksaan, seperti mendidik, mengajak melalui proses sosialisasi. Cara ini lebih bersifat *preventif* (pencegahan) terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian dalam masyarakat, b) *Coercive* yaitu dengan paksaan atau kekerasan, cara ini lebih bersifat *represif* yang berwujud seperti dengan penjatuhan sanksi pada warga yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku dan menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik.

Lebih lanjut Peter L. Berger menegaskan, bahwa olok-olok dan pergunjungan adalah alat kontrol sosial yang kuat dalam kelompok primer segala jenis.⁸ Kemudian mekanisme yang tak kalah efektifnya untuk menegakkan tertib sosial dalam komunitas primer adalah moralitas, adat istiadat, dan tata sopan santun. Seseorang yang dinilai berbuat amoral misalnya, ia bukan hanya dikucilkan tetapi tidak jarang juga akan diberikan sanksi yang betul-betul memalukan sehingga membuat orang lain yang ingin berbuat serupa bakal berpikir seribu kali sebelum benar-benar melanggarnya. Cara terakhir dan tidak sah lagi adalah kekerasan fisik. Menurut Berger, di berbagai komunitas cara-cara kekerasan dapat digunakan secara resmi dan sah manakala semua cara paksaan gagal dilakukan.

⁷ Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 226

⁸ Bagong Suyanto dan J Dwi Narwoko. Opcit. Hlm 147

Selain hal di atas ada beberapa faktor yang ikut menentukan sampai seberapa jauh suatu usaha kontrol sosial oleh kelompok masyarakat itu bisa dilaksanakan secara efektif atau tidak efektif, kelima faktor-faktor tersebut adalah:

1. Menarik tidaknya kelompok masyarakat itu bagi warga yang bersangkutan.

Pada umunya semakin menarik kelompok bagi warganya, semakin besar efektivitas kontrol sosial atas warga tersebut, sehingga tingkah laku mudah dikontrol *conform* terhadap keharusan norma yang berlaku. Pada kelompok yang disukai oleh warganya, kuatlah kecenderungan pada pihak warga-warga itu untuk berusaha sebaik-baiknya agar tidak melanggar norma kelompok.

2. Otonom tidaknya kelompok masyarakat itu.

Makin otonom suatu kelompok, makin efektiflah kontrol sosialnya dan akan semakin sedikitlah jumlah penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di atas norma-norma kelompok.

3. Beragam tidaknya norma-norma yang berlaku di dalam kelompok itu.

Makin beragam norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok, lebih-lebih apabila antara norma-norma itu tidak ada kesesuaian atau apabila malahan bertentangan, maka semakin berkuranglah aktivitas kontrol sosial yang berfungsi menegakkannya.

4. Besar kecilnya atau bersifat anomie tidaknya kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Semakin besar suatu kelompok masyarakat, semakin sukarlah orang saling mengidentifikasi dan saling mengenali sesama warga kelompok. Sehingga, dengan bersembunyi dibalik keadaan anomie (keadaan tak bisa saling mengenal),

semakin bebaslah individu-individu berbuat "semaunya", dan kontrol sosial pun akan tumbuh tanpa daya.

5. Toleran tidaknya sikap kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sering kali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan konsekuen, bukan kondisi-kondisi objektif yang tidak memungkinkan, melainkan karena sikap toleran (menenggang) agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran, pelaksana kontrol sosial itu sering membiarkan begitu saja sementara pelanggar norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan. Adapun toleransi pelaksana-pelaksana kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada umumnya tergantung pada faktor-faktor berikut ini:

a. Ekstrem - tidaknya pelanggaran norma itu

Jika pelanggaran itu bersifat kecil dan tidak seberapa berarti, maka biasanya para petugas kontrol sosial akan bersikap toleran saja. Kriteria yang dipakai untuk menetapkan apakah pelanggaran norma tertentu masih tidak apa-apa ditentukan oleh ukuran tradisi sosial setempat.

b. Keadaan situasi sosial pada ketika pelanggaran norma itu terjadi

Situasi atau keadaan sosial masyarakat saat pelanggaran terjadi bisa saja memberikan pengertian/kelonggaran dan memaafkan bagi pelakunya.

c. Status dan reputasi individu yang ternyata melakukan pelanggaran

Status dan reputasi individu yang melakukan pelanggaran sering sekali merupakan faktor yang mempengaruhi sikap subjektif para petugas kontrol sosial di dalam melaksanakan kontrol sosial itu. Seseorang yang berstatus superior dan

populer seringkali mendapatkan perlakuan yang khusus dari masyarakat sekeliling.

d. Asasi tidaknya nilai moral yang terkandung di dalam norma yang terlanggar.

Kontrol sosial akan lebih diterapkan secara lunak apabila menghadapi persoalan-persoalan yang tidak seberapa asasi daripada kalau menghadapi persoalan-persoalan yang dinilai amat prinsipil serta menyangkut kesejahteraan rohani masyarakat.⁹

Selain hal di atas dalam kontrol sosial hampir selalu dijalankan dengan sanksi. Sanksi yang dimaksud adalah suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpang dari norma sosial, dengan tujuan agar orang tersebut tidak lagi melakukan pelanggaran dan menjadi pelajaran bagi orang lain agar jangan meniru perbuatan yang salah itu.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku penyimpangan ada 3:

1. Sanksi fisik

Sanksi fisik adalah penderitaan yang diberikan mengakibatkan penderitaan fisik, seperti didera, dipenjarakan, diikat, dijemur dan lain-lain.

2. Sanksi psikologis

Beban penderitaan yang dikenakan pada si pelanggar norma bersifat kejiwaan, dan mengenai perasaan, misalnya hukuman dipermalukan di depan umum, dicopot tanda pangkat saat upacara dan sebagainya.

⁹Opcit. hlm 138-143

3. Sanksi ekonomik

Berupa pengurangan kekayaan atau potensi ekonomiknya, misalnya dengan pengenaan denda, penyitaan harta benda, ganti rugi dan lain-lain.

Seperti yang dikemukakan oleh teori kontrol sosial baik KDS (Komite Disiplin Sekolah) maupun GDS (Gerakan Disiplin Sekolah) merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan guru-guru di sekolah tersebut yang ditugaskan dalam melakukan kontrol sosial terhadap siswa. Kontrol sosial dilakukan terhadap tindak pelanggaran kedisiplinan siswa dengan tujuan untuk menanggulangi dan meminimalisir kasus-kasus pelanggaran disiplin sekolah. Dalam mengontrol perilaku siswa, GDS melakukan proses yang terencana yang bertujuan mengajak, membimbing atau bahkan memaksa siswa agar mematuhi kaidah-kaidah atau peraturan sekolah. Pengendalian bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan atau bertujuan untuk mencapai ketertiban di sekolah.

Mekanisme yang ditempuh oleh GDS dalam melakukan proses kontrol sosial adalah dengan cara *persuasif* dan *coercive*. Melalui cara *persuasif*, GSD melakukan sosialisasi mengenai peraturan dan tata tertib sekolah kepada siswa. Kemudian melalui cara *koersif*, GDS memiliki sanksi kepada siswa yang menyimpang dari kedisiplinan atau tata tertib sekolah yang berlaku, namun tidak sampai melakukan pada kekuatan fisik atau kekerasan. Sanksi tersebut berupa sanksi fisik, psikologis, dan ekonomik.

Sesuai dengan teori Berger kendala atau faktor-faktor yang memungkinkan tidak efektifnya pelaksanaan kontrol sosial oleh Komite Disiplin Sekolah (KDS) tersebut antara lain:

1. Menarik tidaknya Komite Disiplin Sekolah bagi siswa atau warga sekolah.
2. Otonom atau tidaknya Komite Disiplin Sekolah tersebut.
3. Beragam tidaknya peraturan yang berlaku di sekolah.
4. Besar kecilnya atau bersifat anomie tidaknya Komite Disiplin Sekolah tersebut.
5. Toleran tidaknya sikap kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan teori Berger, tidak efektifnya Komite Disiplin Sekolah (KDS) dalam hal toleransi sikap kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi didasari oleh hal-hal berikut:

- a. Ekstrem-tidaknya pelanggaran peraturan dan tata tertib sekolah
- b. Keadaan situasi sosial pada ketika pelanggaran itu terjadi
- c. Status dan reputasi siswa yang melakukan pelanggaran
- d. Asasi tidaknya nilai moral yang terkandung di dalam peraturan yang terlanggar.

F. Penjelasan Konsep

1. Revitalisasi

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali atau proses, cara serta perbuatan untuk menghidupkan atau mengiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Revitalisasi dalam penelitian ini adalah upaya atau cara untuk menghidupkan kembali organisasi penegak disiplin sekolah di SMAN 1 Koto XI Tarusan. Awalnya organisasi penegak disiplin sekolah di SMAN 1 Koto XI Tarusan ini bernama Komite Disiplin Sekolah (KDS). Namun, karena KDS sudah tidak efektif melaksanakan fungsi dan tugasnya maka diganti menjadi Gerakan Disiplin Sekolah (GDS).

Revitalisasi organisasi penegak disiplin ini dianggap sebagai upaya pemvitalan mempunyai beragam fungsi yaitu, meningkatkan kembali fungsi dan tugas KDS, meningkatkan kembali kinerja KDS, meningkatkan kembali hubungan kerja sama KDS dengan lingkungan sekolah. Fungsi revitalisasi KDS tersebut disalurkan atau dilaksanakan kembali melalui organisasi penegak disiplin sekolah yang baru yaitu Gerakan Disiplin Sekolah (GDS).

2. Organisasi

Organisasi merupakan suatu sistem, mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama atau tujuan umum. Schein (1982) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggungjawab. Schein juga mengatakan bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain, dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut.¹⁰

3. Komite Disiplin Sekolah

Komite Disiplin Sekolah adalah suatu bentuk organisasi sekolah yang memiliki wewenang serta tugas dan tanggungjawab dalam menegakkan kedisiplinan siswa. Komite Disiplin Sekolah ini dipimpin oleh Drs. Armen (guru mata pelajaran Ekonomi) dan beranggotakan guru-guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan. Komite Disiplin Sekolah dibentuk dari hasil rapat dan kesepakatan pihak sekolah dengan komite sekolah, orangtua atau wali murid serta tokoh masyarakat.

¹⁰ Dr. Arni Muhammad. 2009. Komunikasi Organisasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm 23

Tujuan dibentuknya KDS adalah untuk menciptakan siswa yang disiplin dan patuh terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Tugas dari KDS ini adalah melaksanakan peraturan dan tata tertib sekolah beserta sanksinya untuk menegakkan kedisiplinan di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan. Diantara tugas-tugas tersebut antara lain adalah melaksanakan piket, mengawasi siswa yang melanggar aturan tata tertib sekolah, memproses serta memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.

4. Gerakan Disiplin Sekolah

Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) adalah kegiatan mengontrol siswa dalam bertingkah laku, bersikap dan berpenampilan. Fungsi KDS dan GDS masih sama dengan KDS, tapi perbedaannya adalah KDS hanya mengontrol tingkah laku siswa saja sedangkan GDS mengontrol tingkah laku, sikap dan juga penampilan siswa. Rincian tugas GDS adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan peraturan tata tertib beserta sanksinya
2. Membentuk dua pos piket, yaitu di depan gerbang sekolah dan pintu belakang sekolah yang menjadi tempat untuk akses keluar masuk siswa saat jam pelajaran berlangsung.
3. Melaksanakan razia yang lebih diefektifkan, yang dulunya dilakukan hanya sekali dalam sebulan, sekarang ditingkatkan dua kali dalam sebulan. Razia dilakukan tidak hanya di dalam sekolah melainkan juga dilakukan di

lingkungan sekitar sekolah seperti 4 warung yang berada di depan sekolah, di sekeliling pagar sekolah.¹¹

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan. SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan terletak di jalan Sabai Nan Aluih, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena KDS yang berganti nama menjadi GDS hanya ada di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan, sedangkan di sekolah-sekolah lain yang berada di Tarusan KDS atau GDS tidak ada.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini lebih banyak mengungkap fenomena yang terjadi dari aktor yang terlibat. Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai faktor tidak efektifnya KDS dalam menegakkan kedisiplinan dan cara GDS menegakkan kedisiplinan di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan. Selain itu, penelitian kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh penelitian kuantitatif.¹² Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara kepada beberapa informan yang merupakan anggota Komite Disiplin Sekolah. Menurut Borg dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

¹¹ Data diperoleh dari arsip tata usaha SMA N 1 Koto XI Tarusan

¹² Basriwi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

kata tertulis atau lisan dari orang lain dan perilaku yang diamati dengan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka mengenai dunia sekitar.¹³

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe penelitian studi kasus dari Robert K. Yin. Yaitu sebuah penelitian kualitatif yang mempelajari, menerangkan dan menginterpretasikan suatu kasus atau fenomena yang peneliti teliti adalah *How* (bagaimana) dan *Why* (kenapa). Jenis studi kasus yang peneliti gunakan adalah studi kasus kolektif, dimana disini peneliti mengumpulkan beberapa kasus dan menarik kesimpulan dan generalisasi. Dalam penelitian ini, kasus yang peneliti teliti mengenai penegakan kedisiplinan yang dilakukan oleh Komite Disiplin Sekolah (KDS) dan Gerakan Disiplin Sekolah (GDS), yang difokuskan faktor tidak efektifnya KDS dalam menegakkan kedisiplinan dan cara Gerakan Disiplin Sekolah dalam menegakan kedisiplinan di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong,1998:97). Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu telah menentukan kriteria apa yang harus dimiliki oleh informan agar bisa diteliti wawancara. Kriteria tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, wawancara tidak dilakukan pada sembarang orang saja. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, kriteria informan dalam penelitian ini adalah koordinator serta anggota GDS dan KDS baik yang tidak menjabat maupun yang masih menjabat.

¹³ Moleong, Lexsy. 1991. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta:Proyek Pembangunan LPC Pendidikan.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai faktor tidak efektifnya KDS dalam menegakkan kedisiplinan dan cara GDS dalam menegakkan kedisiplinan di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan, maka informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- a. Koordinator dan anggota GDS dan KDS yang tidak menjabat dan yang masih menjabat
- b. Guru di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan (guru piket, guru BK dan guru honor)
- c. Kepala SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan
- d. Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib sekolah
- e. Pemilik warung yang berada di depan sekolah

Maka jumlah informan dalam penelitian ini adalah 32 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah, 16 orang anggota KDS sekaligus anggota GDS, 5 orang guru mata pelajaran, 2 orang guru BK, 4 orang siswa, 2 orang pemilik warung dan 2 orang wali murid atau orang tua siswa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian digunakan teknik observasi (pengamatan) dan wawancara di lapangan. Observasi merupakan pengamatan secara langsung dari gejala-gejala yang diteliti dengan maksud untuk memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Dalam penelitian ini gejala-gejala yang peneliti amati adalah bagaimana situasi di lapangan terutama upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam menegakkan disiplin sekolah dan kendala

yang dihadapi pihak sekolah dalam mengatasi siswa yang mengkonsumsi miras. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan.

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasi partisipan*, yang merupakan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain dari panca indera seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.¹⁴ Dalam hal ini pengamatan atau observasi dilakukan adalah observasi partisipasi pasif yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan tanpa terlibat dengan kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Hasil penelitian diperoleh dengan melihat, mendengarkan dan mencatat semua hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai faktor tidak efektifnya KDS dalam menegakkan kedisiplinan dan cara GDS dalam menegakkan kedisiplinan di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan.

Peneliti melakukan observasi mulai dari pagi hingga siang sekitar pukul 07.30-14.00 WIB. Observasi yang dilakukan mulai dari berangkat sekolah, melihat lingkungan sekitar sekolah hingga mengamati aktifitas yang terjadi di sekolah khususnya aktifitas anggota GDS. Observasi yang peneliti lakukan berhubungan dengan keadaan siswa, guru, pegawai, serta keadaan di lingkungan sekolah. Peneliti mengobservasi bagaimana GDS mampu menegakkan disiplin sekolah sesuai dengan peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Peneliti juga mengobservasi keadaan sosial

¹⁴ Bungin, Burhan.2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media.

dan interaksi siswa di lingkungan sekolah baik dengan guru, antara sesama siswa dan pegawai sekolah lainnya.

Kesulitan yang peneliti hadapi dalam melakukan observasi adalah susah mengobservasi bagaimana gambaran tentang KDS sebab masa tugas KDS pada saat observasi telah berlalu. Cara mengatasi kesulitan tersebut adalah membantu gambaran aktifitas KDS tersebut melalui wawancara dengan pihak yang paham mengenai KDS. Peneliti tidak hanya mendapatkan kesulitan dalam melakukan observasi, melainkan juga mendapat kemudahan. Kemudahan yang peneliti dapatkan saat melakukan observasi adalah ketika peneliti melakukan penelitian tidak ada guru dan siswa yang merasa canggung dengan kehadiran peneliti. Sehingga data pengamatan yang peneliti dapatkan bisa disebut alamiah atau apa adanya. Hal itu disebabkan karena peneliti sudah sangat kenal dengan seluruh pihak sekolah.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.¹⁵

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan untuk mengetahui gambaran permasalahan. Teknik wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik yang dipilih adalah

¹⁵Editor, Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, 1989. Halaman 192

wawancara mendalam (*indept interview*) semi terstruktur sehingga penulis perlu menjelaskan dan mengarahkan kepada informan tentang fokus permasalahan.

Wawancara dilakukan secara langsung (bertatap muka) dengan informan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini fokusnya berkaitan dengan faktor penyebab tidak efektifnya KDS dalam menegakkan disiplin sekolah dan cara yang dilakukan GDS dalam menegakkan disiplin, studi kasus di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan.

Wawancara pertama yang peneliti lakukan adalah dengan guru Ekonomi yang saat itu menjabat sebagai wakil Humas yang juga merupakan koordinator Komite Disiplin Sekolah di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan. Beliau merupakan salah satu guru yang sangat disiplin di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan dan juga merupakan guru yang sangat peduli dan prihatin terhadap kondisi disiplin siswa. Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan beberapa orang guru atau anggota yang menjabat di KDS dan GDS, guru piket, siswa dan satpam sekolah. Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan, serta dengan keterbukaan informan dalam menjawab pertanyaan penelitian maka peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penegakkan kedisiplinan oleh KDS dan GDS di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan.

Peneliti melakukan wawancara pada pagi hari sekitar jam 09.00 wib ketika guru tidak mengajar. Kemudian dilanjutkan pada jam istirahat sekitar 10.30-10.45 wib untuk mewawancarai guru dan siswa. Peneliti juga mendatangi rumah beberapa orang tua siswa untuk mewawancarai demi memastikan data yang peneliti peroleh.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan kesulitan dan kemudahan dalam melakukan wawancara. Kesulitan yang peneliti alami dalam melakukan wawancara adalah sulitnya guru untuk diwawancarai karena memiliki berbagai urusan dan kesibukan. Upaya yang peneliti lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut adalah membuat janji untuk melakukan wawancara dengan guru yang bersangkutan. Kemudian, kemudahan yang peneliti alami adalah ketika melakukan wawancara secara umum informan yang diwawancarai bersikap ramah dan terbuka kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat leluasa menanyakan hal-hal penting yang berkaitan dengan KDS dan GDS.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian dengan cara mencari dan mempelajari dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini seperti profil sekolah SMA N 1 Koto XI Tarusan, data peraturan tata tertib sekolah, data tentang KDS dan GDS, data tentang pelanggaran siswa, contoh surat perjanjian tata tertib sekolah dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan melakukan perekaman wawancara dan merekam kegiatan GDS dalam menegakkan kedisiplinan di SMA N 1 Koto XI Tarusan. Hal ini berguna sebagai pelengkap data-data yang penulis dapatkan di lapangan. Adapun media yang digunakan peneliti adalah kamera *handphone*, *video handphone*, dan alat perekam (*recorder*) di *handphone*, sehingga penelitian mengenai KDS dan GDS ini bisa dilakukan lebih mendalam.

5. Triangulasi Data

Setelah data terkumpul dilakukan uji kevaliditasan data yang diperoleh peneliti, yaitu melalui uji kredibilitas dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan melakukan berbagai metode dalam mencari keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi data, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.¹⁶

Dalam triangulasi sumber, penulis mengumpulkan dari berbagai sumber. Penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak seperti siswa, anggota KDS dan GDS, kepala sekolah, guru mata pelajaran, pemilik warung depan sekolah dan orang tua/ wali murid, penulis melakukan wawancara dengan kepala sekolah ataupun anggota KDS dan GDS. Untuk memastikan kebenaran data yang didapatkan dari orang tua/wali murid. Begitu pula untuk memastikan kebenaran data dari anggota KDS dan GDS, penulis melakukan konfirmasi kepada orang tua/wali murid, siswa, kepala sekolah ataupun guru mata pelajaran. Begitu seterusnya, untuk memastikan kebenaran data dari satu pihak, penulis melakukan wawancara terhadap informan yang berbeda.

Dalam uji kredibilitas teknik, penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Dalam triangulasi teknik penulis mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti melalui wawancara diperoleh informasi dari salah satu orang tua/wali murid yang menyatakan bahwa ia pernah mendapat kunjungan rumah oleh GDS dalam upaya menegakkan kedisiplinan di

¹⁶Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 241.

SMA N 1 Koto XI Tarusan. Kemudian informasi tersebut dicek dengan observasi atau dokumentasi tentang keadaan siswa di sekolah, keadaan GDS dalam menegakkan kedisiplinan. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada orang tua/wali murid yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Kemungkinan semua data benar, tetapi sudut pandangnya saja yang berbeda-beda.

Selain cara di atas, penulis juga melakukan uji kredibilitas waktu. Penulis melakukan wawancara dengan orang tua/wali murid mengenai latar belakang di gantinya KDS menjadi GSD, cara yang dilakukan GDS dalam menegakkan disiplin di SMA N 1 Koto XI Tarusan, serta keadaan lingkungan sekitar sekolah. Misalnya penulis melakukan wawancara dengan anggota KDS dan GDS dalam menegakkan kedisiplinan. Kemudian penulis melakukan wawancara lagi setelah mendapatkan informasi tentang KDS dan GDS dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan karena waktu dalam wawancara mempengaruhi informasi yang disampaikan oleh informan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Interactive Model of Analysis* dari Milles dan Huberman. Dimana kegiatan analisis yang dilakukan sebagai suatu inisiatif berulang-ulang secara terus menerus sehingga membentuk suatu proses siklus interaktif (hubungan satu sama lain).

Model analisis ini dilakukan dengan jalan:

a. Reduksi data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan, dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan penulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dari informasi yang ada di lapangan peneliti hanya memilih data yang berhubungan dengan penegakkan kedisiplinan oleh KDS dan GDS di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan. Oleh karena itu, hasil yang telah diperoleh di lapangan disaring sesuai dengan data yang peneliti perlukan.

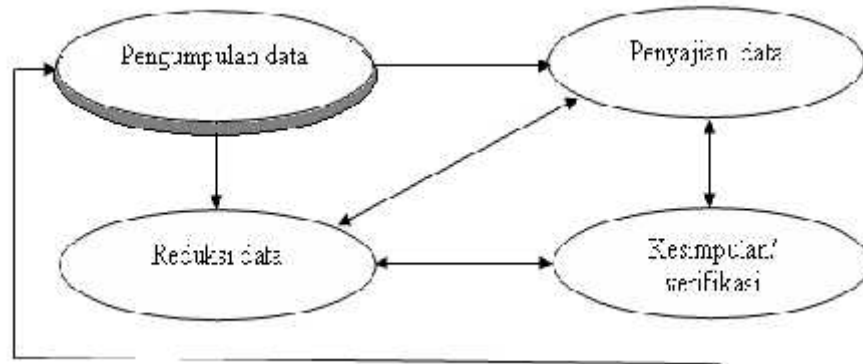
b. Model Data (*Data Display*)

Model data adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun dan memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang sering digunakan dari model data kualitatif ini adalah teks naratif yang berasal dari catatan lapangan yang masih berserakan, tidak berurutan dan sangat luas. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan.

c. Penarikan / Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan pada awalnya masih longgar namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data akhir, sehingga

kesimpulan yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian, akhirnya data tersebut merupakan konfigurasi yang utuh.



Gambar 2. Skema model analisis data interaktif dari Milles dan Huberman.¹⁷

¹⁷Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal 92

BAB II

SMA NEGERI 1 KOTO XI TARUSAN

A. SMAN 1 KOTO XI TARUSAN

1. Sejarah Ringkas Sekolah

Sekolah SMA Negeri 1 Tarusan berdiri pada tahun 1979 yang merupakan kelas jauh dari SMA Painan, yang pada waktu itu menumpang di lokasi SD Sawah Liat Tarusan. Berkat kerja keras para pendiri SMA Negeri Tarusan, di Kec. Koto XI Tarusan maka pada tahun 1980 didapatkan sebidang tanah wakaf dari Bapak M. Dahir di desa Kapuh dan itulah sebagai tempat lokasi SMA Negeri 1 Tarusan seperti saat ini.

SMAN 1 Koto XI Tarusan beralamatkan di Jl. Sabai Nan Aluih Kapuh Tarusan Kenagarian Kapuh Kec.Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Dimana dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Drs. Masdal Fitri, M.Si.

2. Visi dan Misi Sekolah

Untuk mewujudkan harapan, cita-cita dan impian yang ingin dicapai oleh warga sekolah, maka setiap sekolah memiliki visi dan misi dalam mewujudkan hal tersebut. Dalam hal tersebut visi dari SMAN N 1 Koto XI Tarusan adalah berprestasi, berkompetensi, kompetitif dan berkarakter islami serta menguasai IPTEK yang dilandasi iman dan taqwa. Sedangkan misinya adalah menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas, terampil, berkarakter dan bertakwa, menyelenggarakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, efisien dan menyenangkan, memotivasi dan membantu siswa untuk mengenal

potensi dirinya dan mengembangkan secara optimal, menumbuhkan semangat kerja, disiplin, dan rasa tanggungjawab kepada seluruh warga sekolah, menerapkan manajemen partisipatif dan melibatkan seluruh warga sekolah serta unsur pimpinan di sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mewujudkan kemampuan olah raga dan seni yang tangguh dan kompetitif.

3. Keadaan Sekolah

a. Keadaan Fisik Sekolah

SMAN 1 Koto XI Tarusan yang berada di Jl. Sabai Nan Aluih Kapuh Tarusan, Kenagarian Kapuh Kec.Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. SMAN 1 Koto XI dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Drs. Masdal Fitri M.Si. Struktur sekolah terdiri dari urutan dari kepala sekolah sampai pada pegawai yang berada di lingkungan sekolah.

b. Keadaan Lingkungan Sekolah

SMAN 1 Koto XI Tarusan beralamat di Jl. Sabai Nan Aluih–Kapuah Tarusan. Dimana sekolah ini berdiri diatas tanahseluas 10.540 m², yang berada di sekitar pemukiman penduduk. Plang SMA berdiri di pinggir jalan poros Padang Painan untuk masuk ke sekolah tersebut kira-kira berjarak 100 Meter. Di depan sekolah berdiri sebuah tower jaringan IND-TELKOMSEL dan terdapat sebuah makam meskipun tidak banyak tetapi ada beberapa buah makam milik warga Kapuah. Di sekeliling sekolah masih berdiri rumah-rumah warga.

c. Keadaan Guru dan Siswa

1) Kepala sekolah dan Guru

SMAN 1 Koto XI Tarusan dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Drs. Masdal Fitri M.Si, dan didampingi oleh beberapa wakil diantaranya wakil humas yang dijabat oleh Drs. Adlim Gidra, wakil kurikulum yang dijabat oleh Musyofah, S.Pd., M.Si, wakil kesiswaan yang dijabat oleh Em Suryani Tasar, S.Pd, dan wakil sarana yang dijabat oleh Drs. Nurjafri.

a) Data guru mata pelajaran

Tabel 4.
Data Guru Mata Pelajaran SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan

No	Mata pelajaran	Jumlah guru	Keterangan
1	PKn	1	
2	PAI	5	
3	B.Indonesia	6	
4	B. Inggris	9	1 Wakasek
5	Biologi	6	
6	Pend. Jasmani	3	
7	Matematika	7	
8	Fisika	7	
9	Biologi	4	
10	Kimia	4	1 Wakasek
11	Ekonomi	6	2 Wakasek
12	Sos/Antrop.	2	
13	Geografi	4	
14	P.Q	6	
15	Pend. Seni	3	
16	TIK	6	
17	BP/BK	6	1 Kepsek
18	Bhs. Arab	-	
19	Bhs.Jepang	2	
	Jumlah	87	

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan, 2015

Jumlah guru di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan adalah 87 orang yang terdiri dari 1 orang guru PKn, 5 orang guru PAI, 6 orang guru Bahasa Indonesia,

9 orang guru Bahasa Inggris, 6 orang guru Biologi, 3 orang guru Pendidikan Jasmani, 7 orang guru Matematika, 7 orang guru Fisika, 4 orang guru Kimia, 6 orang guru Ekonomi, 2 orang guru Sosiologi, 4 orang guru Geografi, 6 orang guru P.Q, 3 orang guru Pendidikan Seni, 6 orang guru TIK, 6 orang guru BP/BK, dan 2 orang guru Bahasa Jepang. Dari 87 orang guru mata pelajaran 1 orang diantaranya merupakan Kepala Sekolah dan 4 orang diantaranya merupakan Wakil Kepala Sekolah.

b) Tenaga pendukung

Tabel.5
Jumlah Tenaga Pendukung SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan

No	Jenis Pegawai	Jumlah	Jenjang Pendidikan				
			SMP	SMA	DI	DIII	SI
1	PNS	6	-	5	-	-	1
2	Honor	9	-	5	1	-	3
	Jumlah	15	-	10	1	-	4

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan, 2015

Selain guru mata pelajaran, juga terdapat tenaga pendukung demi terlaksananya dan tercapainya tujuan pendidikan di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan. Tenaga pendukung tersebut terdiri dari 6 orang PNS dan 9 orang pegawai honor.

c) Siswa

Tabel 6.
Jumlah Siswa SMA N 1 Koto XI Tarusan Tahun Ajaran 2015/2016

Tingkat dan Program Pengajaran	Jumlah Siswa (orang)		
	Laki-Laki	Perempuan	L + P
Kelas X	137	185	322
Kelas XI IPA	33	125	158
Kelas XI IPS	45	50	95
Kelas XII IPA	67	124	191
Kelas XII IPS	70	45	115
Total	352	529	881

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan, 2015

Jumlah siswa di SMAN 1 Koto XI Tarusan adalah 881 orang siswa yang terdiri dari 352 orang laki-laki dan 529 orang perempuan. Kelas X berjumlah 322 orang, kelas XI IPA berjumlah 158 orang, kelas XI IPS berjumlah 95 orang, kelas XII IPA berjumlah 191 orang, dan kelas XII IPS berjumlah 115 orang.

4. Fasilitas Sekolah

Fasilitas yang ada di sekolah SMAN 1 Koto XI Tarusan diantaranya :

- a. Kepemilikan Tanah : Pemerintah
- b. Status Tanah : Hak Milik
- c. Luas Tanah : 10.540 m²
- d. Luas Seluruh Bangunan : 2.713,5 m²

Tabel 7.
Data Ruangan Milik SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan

No	Fasilitas	Jumlah
1	Ruang Teori / Kelas	25 Ruang
2	Ruang Pustaka	1 Ruang
3	Ruang BK	1 Ruang
4	Ruang Kepala Sekolah	1 Ruang
5	Ruang Majelis Guru	1 Ruang
6	Ruang TU	1 Ruang
7	Ruang OSIS	1 Ruang
8	Rumah Penjaga Sekolah	1 Ruang
9	Ruang Kopsis	1 Ruang
10	Ruang Wakasek	1 Ruang
11	Kamar Mandi / WC Guru	2 Ruang
12	Kamar Mandi / WC Siswa	10 Ruang
13	Labor IPA	1 Ruang
14	Ruang Komputer	1 Ruang
15	Labor Bahasa	1 Ruang
16	Mushalla	1 Ruang

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan, 2015

e. Sarana Sekolah

- 1) Internet / Schoolnet : 1 Unit
- 2) LCD Proyektor : 3 Unit
- 3) Komputer PC Labor : 25 Unit
- 4) Komputer PC Kantor : 3 Unit
- 5) VCD/DVD Player : 1 Unit
- 6) Televisi Edukasi : 4 Unit

5. Tata Tertib sekolah

a. Sebelum dan Sesudah Belajar

- 1) Waktu belajar dimulai jam 07.30 WIB.
- 2) Piket kelas dilakukan 10 menit jam terakhir pelajaran untuk hari berikutnya, piket kelas bertugas untuk membersihkan ruangan kelas, ketertiban dan keamanan serta menyiapkan alat-alat keperluan pelajaran.
- 3) Paling lambat 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai seluruh siswa sudah hadir di sekolah, dan siswa yang terlambat sampai 5 menit boleh diizinkan masuk tanpa melalui prosedur piket.
- 4) Siswa yang terlambat lebih dari 5 menit harus melapor kepada guru piket untuk dicatat kemudian diserahkan kepada guru BK mempersilakan masuk kelas pada jam berikutnya dengan membawa surat tanda izin masuk dari guru piket.
- 5) Sebelum jam pertama dimulai dan pelajaran terakhir selesai, pada hari itu seluruh siswa di setiap kelas harus melakukan do'a bersama di kelasnya (diucapkan).
- 6) Di dalam kelas setiap siswa harus menjaga ketenangan, ketertiban, kebersihan, sehingga memungkinkan proses pembelajaran berjalan lancar dan baik.
- 7) Pada waktu pertukaran jam pelajaran/guru, siswa tidak dibenarkan keluar kelas sebelum guru berikutnya hadir/masuk kelas. Piket kelas segera menghubungi guru yang bersangkutan jika seandainya guru tersebut tidak hadir pada waktunya di kelas.

- 8) Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa tidak dibenarkan keluar kelas kalau tidak begitu penting dan harus seizin guru yang mengajar.
- 9) Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa tidak dibenarkan keluar pekarangan sekolah tanpa izin piket/guru dan diketahui wakil kesiswaan.

b. Kegiatan Upacara Bendera

- 1) Pelaksanaan Upacara Bendera dipergilirkan setiap kelas dan dilaksanakan setiap hari Senin pagi.
- 2) Kelas yang mendapat giliran pada pelaksanaan upacara bendera harus mengadakan latihan dilaksanakan di luar jam pelajaran.
- 3) Upacara bendera dimulai pukul 07.30 WIB dan siswa harus hadir di sekolah lebih awal.
- 4) Dalam upacara bendera seluruh siswa harus berpakaian seragam sekolah lengkap dengan atribut dan topi sekolah.
- 5) Kegiatan upacara yang bersifat nasional, keagamaan atau upacara lainnya yang dilaksanakan di sekolah, siswa harus mengikutinya dan mematuhi ketentuan kegiatan tersebut.

c. Pakaian

Senin	: Putih abu-abu dan jilbab putih
Selasa	: Putih abu-abu dan jilbab putih
Rabu	: Putih abu-abu dan jilbab putih
Kamis	: Putih abu-abu dan jilbab putih
Jum'at	: Baju muslim sekolah
Sabtu	: Pramuka dan jilbab Pramuka

Ketentuan :

1) Siswa Perempuan

- a) Model rok lipat depan (tidak ada belahan)
- b) Baju kemeja putih dan Pramuka panjang tangan longgar tertutup Panggul, lengkap dengan lambing OSIS, lokasi dan nama yang dijahitkan dengan dasar hitam.
- c) Jilbab segi empat (putih dan Pramuka)

2) Siswa laki-laki

- a. Model celana sesuai dengan gambar (tidak pisak pendek)
- b. Baju kemeja putih dan pramuka pendek tangan longgar lengkap dengan lambang OSIS, lokasi dan nama yang dijahitkan dengan dasar hitam.

6. Proses Belajar Mengajar

Kegiatan belajar mengajar di SMA N 1 Koto X1 Tarusan di mulai dari jam 7.30–13.45, dimana 1 jam belajar terdiri dari 45 menit. Pada hari senin di satu jam pertama dilaksanakannya upacara bendera yang wajib diikuti oleh para guru dan siswa SMAN 1 Koto XI Tarusan dan pada hari jum'at di satu jam pertama dilakukannya kegiatan kerohanian yang mana petugasnya diambil dari masing-masing lokal. Jadi setiap lokal memiliki tugas setiap minggunya.

B. GERAKAN DISIPLIN SEKOLAH (GDS)

1. Sejarah Berdirinya GDS

Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) adalah kegiatan mengontrol siswa dalam bertingkah laku, bersikap dan berpenampilan sesuai dengan peraturan tata tertib

sekolah. Gerakan Disiplin Sekolah merupakan suatu organisasi atau wadah kerja sama yang mengarah kepada sistem kerja untuk menciptakan kedisiplinan. Tujuan dibentuknya Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) adalah menciptakan lingkungan sekolah (siswa) yang tertib sesuai dengan peraturan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan.

Dulunya Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) bernama Komite Disiplin Sekolah (KDS). Alasan digantinya KDS menjadi GDS adalah kurang efektifnya KDS atau Komite Disiplin Sekolah dalam menjalankan fungsinya.

2. Struktur Gerakan Disiplin Sekolah (GDS)

Pembina :Drs. Masdal Fitri, M.Si

Koordinator : 1. Drs. Adlim Gidra
2. Musyofah, S.Pd., M.Si

Anggota : 1. Em Suryani Tasar, S.Pd 6. Erizon, S.Pd
2. Firman ZN, S.Pd 7. Harpiyeni, S.Si
3. Efita Yusda, S.Pd 8. Irmanili, S.Pd
4. Drs. Aris Munandar 9. Lidia Marta, S.E
5. Masri, S.Pd 10. Asmal, S.Pd

3. Tugas-Tugas Gerakan Disiplin Sekolah (GDS)

Rincian tugas Gerakan Disiplin Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan peraturan tata tertib berserta sanksinya
2. Membentuk dua pos piket, yaitu di depan gerbang sekolah dan pintu belakang sekolah yang menjadi tempat untuk akses keluar masuk siswa saat jam pelajaran berlangsung.

3. Melaksanakan razia serta yang lebih diefektifkan, yang dulunya dilakukan hanya sekali dalam sebulan, sekarang ditingkatkan dua sampai tiga kali dalam sebulan. Razia dilakukan tidak hanya di dalam sekolah melainkan juga dilakukan di lingkungan sekitar sekolah seperti 4 warung yang berada di depan sekolah, di sekeliling pagar sekolah. Selain melaksanakan razia, anggota GDS juga melakukan pengrebekan yang dilakukan secara mendadak.
4. Membuat laporan hasil temuan di lapangan dan menyerahkan laporan serta mendiskusikannya dengan kepala sekolah. Laporan tersebut di buat secara bergiliran oleh anggota GDS.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan hasil pembahasan yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Komite Disiplin Sekolah (KDS) dalam menegakkan kedisiplinan di SMAN 1 Koto XI Tarusan terdiri atas enam faktor. *Pertama*, kerja sama tim tidak menggerakkan anggota Komite Disiplin Sekolah (KDS) dalam menjalankan tugasnya. Adanya sistem kerja tim atau kelompok malah menjadi faktor penyebab utama tidak efektifnya fungsi anggota KDS yang bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan. Karena tugas dilaksanakan dalam bentuk kerja sama tim, tidak semua anggota KDS yang menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditentukan. *Kedua*, kurangnya tenaga kerja (anggota KDS yang hanya sedikit). Kurangnya tenaga kerja yang menjalankan tanggungjawabnya sebagai anggota KDS di sekolah tersebut menyebabkan banyak tugas yang tidak dijalankan secara maksimal seperti melakukan piket, razia dan tugas lainnya.

Ketiga, kurangnya kontrol kinerja Komite Disiplin Sekolah (KDS) oleh Kepala Sekolah. Kepala sekolah jarang melaksanakan pengawasan atau control kinerja terhadap KDS hal itu disebabkan karena kepala sekolah sibuk dengan tugasnya sebagai guru dan tugasnya sebagai kepala sekolah, sehingga sulit untuk mengetahui sejauh mana KDS telah menjalankan tugasnya sesuai tanggungjawab yang telah diberikan. *Keempat*, ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan

tunjangan. Anggota KDS mendapatkan tunjangan di luar gaji pokok mereka sebagai guru, disebabkan karena tugas sebagai anggota KDS merupakan tanggungjawab tambahan bagi guru di luar jam mengajar sebesar Rp 80.000,-. Tunjangan tersebut sebesar Rp 80.000,- merupakan honor yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Namun tunjangan tersebut dianggap kecil oleh anggota KDS karena tugas dalam menegakkan kedisiplinan di anggap berat dan tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh. *Kelima*, jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah sangat jauh. Jarak yang jauh menyebabkan anggota KDS tidak efektif melaksanakan tugasnya dalam hal melakukan kunjungan ke rumah siswa yang melakukan pelanggaran dengan jumlah point melebihi batas yang telah ditemukan. Selain itu, jarak tempat tinggal siswa yang jauh dari sekolah mengakibatkan jumlah keterlambatan siswa sehingga tidak bisa diatasi. Masalah keterlambatan merupakan problema utama yang dihadapi oleh KDS selama melaksanakan tugas. *Terakhir*, lingkungan sekolah yang tidak mendukung. Lingkungan sekolah yang seperti kantin, warung-warung yang berada di depan sekolah, rumah warga di sekitar sekolah dan lainnya tidak memberikan dukungan terhadap penegakkan kedisiplinan siswa di sekolah. Siswa dibiarkan berbelanja, duduk-duduk dan merokok di warung maupun kantin yang ada di lingkungan sekolah tersebut.

Sementara itu, cara-cara Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) dalam menegakkan disiplin di sekolah dilakukan dengan empat cara. *Pertama*, mengganti sistem kerja tim dengan gerakan perseorangan. Adanya sistem kerja perseorangan membuat anggota GDS lebih bebas dan leluasa dalam melaksanakan tugasnya. Guru yang ditunjuk sebagai anggota GDS mampu melaksanakan tugasnya secara individu tanpa

menunggu aba-aba dari anggota GDS lainnya. *Kedua*, memperketat dan mempertegas pelaksanaan sanksi dan pelanggaran. Setiap anggota GDS harus menegakkan kedisiplinan kepada setiap siswa secara adil. Siswa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan bobot point yang telah dilanggar tanpa adanya toleransi. *Ketiga*, mensinkronkan kerja antara kepala sekolah, BK, dan GDS. Mensinkronkan kerja antara kepala sekolah, guru mata pelajaran dan guru BK yang dimaksud adalah meluangkan waktu untuk ikut membantu GDS dalam melaksanakan tugasnya. *Keempat*, mensosialisasikan tata tertib sekolah kepada pihak-pihak yang terkait (siswa, guru, lingkungan sekitar atau tokoh masyarakat). Dilakukannya sosialisasi tentang peraturan tata tertib sekolah kepada pihak-pihak tersebut ditujukan agar setiap pihak mengetahui peraturan tata tertib yang berlaku di SMA N 1 Koto XI Tarusan dan diharapkan ikut bekerja sama dengan pihak sekolah dalam menegakkan peraturan tersebut.

Sesuai dengan teori Berger kendala atau faktor-faktor yang memungkinkan tidak efektifnya pelaksanaan kontrol sosial oleh Komite Disiplin Sekolah (KDS) tersebut adalah menarik tidaknya Komite Disiplin Sekolah bagi siswa atau warga sekolah, otonom atau tidaknya komite disiplin sekolah tersebut, beragam tidaknya peraturan yang berlaku di sekolah, besar kecilnya atau bersifat anomie tidaknya komite disiplin sekolah tersebut dan toleran tidaknya sikap kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Mekanisme yang ditempuh oleh GDS dalam melakukan proses kontrol sosial adalah dengan cara *persuasive (preventive)*, *represive* dan *coercive*. Melalui cara persuasif, GSD mensosialisasikan tata tertib sekolah kepada pihak-pihak yang terkait (siswa, guru, lingkungan sekitar atau tokoh masyarakat).

Selain itu, GDS juga mengganti sistem kerja tim dengan gerakan perseorangan dan) mensinkronkan kerja antara kepala sekolah, BK, dan GDS. Kemudian melalui cara koersif, GDS memperketat dan mempertegas pelaksanaan sanksi dan pelanggaran. Sanksi tersebut berupa sanksi fisik, psikologis, dan ekonomik.

B. SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap peneliti selanjutnya dalam mengkaji hal-hal yang sama. Penelitian ini jauh dari keadaan sempurna, banyak hal yang dirasa belum terungkap dalam penelitian ini. Untuk itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengungkap hal-hal yang belum terungkap oleh peneliti. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan dalam menegakkan kedisiplinan terhadap siswa-siswanya dengan membentuk tim khusus atau organisasi khusus untuk menegakkan kedisiplinan di sekolah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Rifai & dkk. 1989. *Disiplin Murid SMTA di Lingkungan Pendidikan Formal*. Jakarta: Depdikbud.
- Bagong Suyanto dan J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Editor, Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*.
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip. 2010. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Margaret M. Poloma. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Arni. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexsy. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Proyek Pembangunan LPC Pendidikan.
- Mulyasa, E. 2006. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (kemandirian guru dan kepala sekolah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ritzer, George. 2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta.
- Soerjono, Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada